

## BAB 5

### VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

#### 5.1 Visi

“Memajukan Kesejahteraan Umum” merupakan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea IV, yang harus diupayakan secara optimal terwujud dalam pelaksanaan pembangunan nasional, termasuk pembangunan Jawa Timur, karena pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Capaian keberhasilan penyelenggaraan pembangunan Jawa Timur pada lima tahun terakhir (2009-2014) untuk mewujudkan “Jawa Timur yang Makmur dan Berakhlak dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”, lewat misi “Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat” harus terus dipelihara dan ditumbuhkembangkan, sebagai modal dasar untuk meraih capaian dan prestasi pembangunan yang lebih baik pada periode lima tahun mendatang (2014-2019).

Berpijak pada visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Timur 2005-2025, yaitu terwujudnya Jawa Timur sebagai “Pusat Agribisnis Terkemuka, Berdaya Saing Global, dan Berkelanjutan”, melalui lima tahapan periodisasi, maka periode 2014-2019 merupakan pembangunan jangka menengah tahap ketiga. Pembangunan tahap ketiga ini dengan berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan pembangunan tahap pertama dan kedua, ditujukan lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di pelbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam, dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Tahap ketiga ini ditujukan untuk memantapkan kemajuan daerah dan mengembangkan kesejahteraan. Dinamika ekonomi yang atraktif pada tahap sebelumnya dimantapkan dengan memperluas jangkauan jaringan kerja kegiatan ekonomi yang tidak hanya berskala nasional, tetapi juga internasional. Tahapan ini juga ditandai makin dominannya peran pengetahuan dan penguasaan teknologi, serta





diarahkan pada upaya optimal pendayagunaan potensi sumber daya, sehingga kemajuan yang dicapai menjadikan Jawa Timur lebih berdaya saing.

Berpedoman pada arah pembangunan daerah Jawa Timur sebagaimana termuat dalam RPJPD Jawa Timur 2005-2015 tersebut, dan berbagai capaian pembangunan periode 2009-2014 yang signifikan, potensi dan isu-isu strategis, serta tantangan Jawa Timur lima tahun ke depan, dan visi, misi, program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih (2014-2019), maka diperlukan kesinambungan pembangunan yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis (*sustain and change*) menuju Jawa Timur lebih baik, dan lebih sejahtera.

Visi pembangunan Jawa Timur yang ingin diwujudkan pada periode 2014-2019 adalah:

**“Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri,  
Berdaya Saing, dan Berakhlak”**

dengan penjelasan sebagai berikut:

**Jawa Timur Lebih Sejahtera**

Adalah terwujudnya peningkatan lebih lanjut dari kondisi makmur, yang tidak hanya berdimensi material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniyah, yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif, dalam tata kehidupan (juga tata pemerintahan) yang aman dan tenteram, rukun dan damai, di samping terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, juga bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, serta bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang makin berkualitas secara fisik, psikis maupun intelektualitas. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang hidup dalam situasi dan kondisi aman, tenteram, damai, sentosa, dan makmur.





### **Jawa Timur Lebih Berkeadilan**

Adalah terwujudnya kesejahteraan yang merata bagi semua orang, bukan kesejahteraan orang-seorang maupun sekelompok orang. Kesejahteraan yang berkeadilan adalah bersifat distributif, yakni adanya kesetaraan kondisi awal yang dibutuhkan bagi setiap warga untuk dapat mengembangkan dirinya, dan proporsionalitas hasil yang diperolehnya dari setiap upaya yang dilakukan. Proses pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, yang berjalan dalam proses perubahan struktur yang benar, diarahkan agar rakyat yang menikmati pembangunan haruslah mereka yang menghasilkan, dan mereka yang menghasilkan haruslah yang menikmati secara berkeadilan.

Upaya mewujudkan kesejahteraan yang lebih berkeadilan merefleksikan sikap dan komitmen keberpihakan kepada elemen masyarakat yang lemah atau termarginalisasi, agar yang lemah tidak menjadi bertambah lemah, karena kekurangberdayaan menghadapi yang kuat. Keberpihakan ini merupakan upaya mencegah terjadinya persaingan tak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

### **Jawa Timur Lebih Mandiri**

Adalah terwujudnya kemampuan atau keberdayaan yang dapat membangun, dan memelihara kelangsungan hidup berlandaskan kekuatannya sendiri. Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat haruslah dijalankan bersamaan dengan peningkatan kemandirian. Membangun kemandirian sosial bukan dalam makna membangun isolasi sosial, tetapi mengembangkan kemampuan "*Berdikari*" (*Berdiri di atas Kaki Sendiri*), dan secara pro-aktif melepas belenggu ketergantungan dan hambatan struktural yang memasung potensinya, baik secara ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya, sehingga mampu berdaulat dan bebas dalam politik; Berkedaulatan hukum; Berdikari dalam ekonomi; dan Berkepribadian dalam kebudayaan; yang berlangsung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.





## **Jawa Timur Lebih Berdaya Saing**

Adalah terwujudnya peningkatan kemampuan daya saing Jawa Timur, bukan hanya berdasarkan keunggulan komparatif(*comparative advantage*), tetapi terutama keunggulan kompetitif(*competitive advantage*), menyangkut peningkatan kualitas produk, manajemen produksi, pemasaran, dan akses permodalan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusausaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya menghadapi *ASEAN Economic Community* pada 2015.

Di samping itu, Jawa Timur Lebih Berdaya Saing juga berkait dengan upaya meningkatkan daya saing dan kemandirian budayalokal menghadapi *ASEAN Socio-Cultural Community* pada 2015, agar tidak tergusur dan lenyap ditelan oleh integrasi sosio-kultural ASEAN, maupun budaya asing lainnya. Puncak-puncak kebudayaan daerah yang merupakan kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional harus terus dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan agar karakter dan jati diri bangsa menjadi unggulan sebagai daya saing, dan karenanya tetap mampu berkepribadian dalam kebudayaan. Budaya dan tradisi lokal yang merupakan kearifan lokal (*local wisdom*) harus pula dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan sebagaibasis pembangunan, yang pada gilirannya dapat memperkuat pembangunan karakter bangsa secara keseluruhan. Kearifan lokal merupakan pengetahuan setempat (*indigenous or local knowledge*), atau kecerdasan lokal (*local genius*), yang menjadi dasar identitas budaya (*cultural identity*).

## **Jawa Timur Lebih Berakhlak**

Adalah terwujudnya peningkatan akhlak mulia, baik secara individual maupun sosial, dalam konteks rohaniah maupun spiritual, karena kesejahteraan tanpa akhlak dan moral akan membawa kita ke dalam jurang kehancuran. Akhlak merupakan budipekerti, perangai, tabiat, atau moralitas luhur yang terutama bersumber dari kesalehan individual sesuai ajaran agama yang diyakini, yang pada gilirannya akan melahirkan kesalehan sosial, yang ditandai oleh semakin meningkatnya empati sosial, toleransi





sosial, solidaritas sosial, dan sikap demokratis dalam menghadapi perbedaan, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang akan bermuara pada terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Visi terwujudnya “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak”, berlangsung dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karenanya pembangunan Jawa Timur juga ditujukan untuk memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan,serta kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan. Jawa Timur untuk Indonesia.

## 5.2 Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2014-2019, “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak” tersebut, ditempuh melalui lima misi yang diberi judul: **“Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik”**. Judul atau label misi ini merupakan kesinambungan, sekaligus upaya peningkatan kualitas pembangunan dari misi sebelumnya (2009-2014), yaitu “Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat”.

Label “Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik” yang membingkai lima misi untuk mewujudkan visi Jawa Timur 2014-2019 tersebut, menunjukkan sikap keberpihakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejalan dengan visi, misi, dan program Gubernur-Wakil Gubernur terpilih (2014-2019) kepada elemen masyarakat yang lemah, sekaligus menegaskan bahwa upaya mewujudkan “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak” tersebut, bersifat inklusif dan berkeadilan, termasuk bagi *wong cilik*, atau kelompok masyarakat yang kurang beruntung secara sosial ekonomi.

*Wong cilik* yang dimaksud di sini adalah mereka yang mengalami ketidakberdayaan (*powerless*) akibat termarginalisasi (*marginalized*); terdevaluasi (*devalued*); dan mengalami keterampasan (*deprivation*); serta pembungkaman (*silencing*) dalam proses pembangunan, yang secara sosial ekonomi mereka adalah





berstatus kesejahteraan 40% terendah, sebagaimana kriteria pengelompokan yang digunakan dalam Basis Data Terpadu, Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011.

Lima misi “Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik” untuk mewujudkan visi “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak,” adalah sebagai berikut:

**Misi Pertama: Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.**

Misi ini untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi semua, melalui peningkatan perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pemenuhan serta pemerataan layanan dasar, dengan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu, dan perluasan akses terhadap pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan.

**Misi Kedua: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi.**

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi bagi semua (inklusif), sekaligus meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing, terutama berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi, melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan UMKM dan koperasi, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan, peningkatan net ekspor perdagangan dalam dan luar negeri, serta percepatan kinerja sektor industri agro maupun non-agro, peningkatan kontribusi sektor pariwisata, melalui pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, dan pemeliharaan serta pelestarian seni budaya lokal, dan peningkatan kinerja penanaman modal dalam negeri, luar negeri, dan investasi daerah, serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat.





**Misi Ketiga: Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang.**

Misi ini untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan penataan ruang wilayah provinsi yang berkelanjutan.

**Misi Keempat: Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.**

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan tata pemerintahan yang bersih (*clean government*), serta profesionalisme pelayanan publik.

**Misi Kelima: Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.**

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan kesalehan sosial masyarakat melalui peningkatan kualitas kehidupan beragama, termasuk di dalamnya kerukunan antar-umat beragama, sehingga dapat tercipta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, sekaligus merevitalisasi budaya dan tradisi yang merupakan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya membangun karakter bangsa, dan harmoni sosial, dengan dukungan keamanan dan ketertiban yang semakin meningkat, serta penegakan supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

### **5.3 Tujuan dan Sasaran**

Untuk mewujudkan visi Jawa Timur 2014-2019 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Pencapaian tujuan dan sasaran dapat terlihat jika ada ukuran dari keberhasilan atau ketidakberhasilan upaya pembangunan, yang dikenal dengan indikator kinerja pembangunan daerah. Tujuan pembangunan Jawa Timur 2014-2019 dikatakan





berhasil jika indikator tujuan pembangunan yang merupakan dampak-dampak akhir (*impact*) dari berbagai program dan aktivitas pembangunan daerah mencapai nilai/target yang telah ditetapkan. Indikator tujuan mencerminkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Jawa Timur dalam melaksanakan pembangunan dalam kurun waktu 2014-2019. Jika indikator tujuan pembangunan dapat mencapai atau melampaui nilai yang ditargetkan, maka bisa dikatakan pula bahwa misi dan visi Pemerintah Jawa Timur 2014-2019 tercapai.

Tujuan pembangunan dapat tercapai jika sasaran-sasaran yang telah ditetapkan per tujuan juga tercapai. Oleh karena itu, dibutuhkan ukuran-ukuran (indikator) yang bisa mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan sasaran-sasaran pembangunan, yang disebut dengan indikator sasaran pembangunan. Dalam kurun waktu 2014-2019, tujuan dan sasaran serta indikator tujuan dan indikator sasaran pembangunan Jawa Timur dapat dilihat di Tabel 5.1.

#### **5.4 Penyelarasan Pencapaian Sasaran RPJMN**

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, pada pasal 2 ayat (3) huruf b menyebutkan bahwa RPJMN berfungsi sebagai bahan penyusunan dan penyesuaian RPJMD dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran Nasional yang termuat dalam RPJMN. Sesuai tugas, fungsi dan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Jawa Timur melaksanakan pembangunannya dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Nasional. Dukungan tersebut tercermin dalam sasaran-sasaran pembangunan Jawa Timur 2014-2019 yang selaras dengan sasaran pembangunan nasional yang dituangkan dalam RPJMN 2015-2019, baik dalam penetapan indikator sasaran maupun nilai/targetnya. Keterkaitan atau keselarasan antara sasaran-sasaran pembangunan Jawa Timur 2014-2019 dengan sasaran pembangunan nasional tahun 2015-2019 yang disajikan dalam Tabel 5.2.





**Tabel 5.1 Visi, Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019**

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan	OPD	Satuan	Target RPJMD Lama					Usulan Perubahan Target		
								2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Misi 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang berkeadilan	1. Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, kesehatan, dan perluasan lapangan kerja serta Mempercepat dan memperluas penanggulang-an kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	1. Meningkatkan partisipasi angkatan kerja, dan penyerapan tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Ketenaga-kerjaan	Disnakertrans	Persen	70,00	70,07	70,15	70,22	70,30	66,31	66,50	66,68
				Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	Ketenaga-kerjaan	Disnakertrans	Persen	-	-	-	-	-	65,50	66,00	67,00
			2. Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis	Persentase peningkatan pendapatan pekerja di Jawa Timur	Ketenaga-kerjaan	Disnakertrans	Persen	-	-	-	-	-	8,25	9,0	9,5
		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	3. Meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas	Indeks Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Persen	-	-	-	-	-	0,61	0,62	0,63
				Indeks Minat Baca	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Indeks	-	-	-	-	-	70,00	72,00	74,00
			5. Meningkatkan mutu pendidikan tenaga kependidikan	Persentase guru jenjang SMA, SMK, dan PKLK berkualifikasi minimal S1/D4	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Persen	-	-	-	-	-	98,80	98,90	99,00
			6. Menurunnya angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan	Angka Kematian Ibu (AKI)	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit	per seribu penduduk	97,30	97,25	97,20	97,15	97,10	90,00	88,00	86,00
				Angka Kematian Bayi (AKB)	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit	per seribu penduduk	25,61	24,74	23,87	23,00	22,12	23,00	22,5	22,00
				Persentase stunting	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit	Persen	-	-	-	-	-	25,00	24,00	23,00
			7. Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai	Angka Harapan Hidup (AHH)	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit	Tahun	70,70	70,82	70,94	71,06	71,18	72,08	72,55	72,70







Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan	OPD	Satuan	Target RPJMD Lama					Usulan Perubahan Target		
								2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019
			dengan standart pelayanan minimal	Persentase Rumah Sakit terakreditasi	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit	Persen	-	-	-	-	-	70,00	75,00	80,00
				Persentase RFT Rate Kusta	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit	Persen	-	-	-	-	-	>91	93,00	95,00
				Persentase penderita HIV yang mendapatkan ARV	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit	Persen	-	-	-	-	-	>80	81,00	83,00
				Persentase keberhasilan pengobatan TB	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit	Persen	-	-	-	-	-	>90	92,50	93,00
			8. Meningkatkan Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	Persentase Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	Perumahan dan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Persen						68,75	73,69	78,14
			9. Meningkatkan kualitas peran pemuda, dan prestasi olahraga	Persentase Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan	Kepemuda-an dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Persen	-	-	-	-	-	15,03	16,53	18,19
				Jumlah Atlet Yang berprestasi	Kepemuda-an dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	orang	-	-	-	-	-	1261	1055	1288
		Persentase Penduduk Miskin	10. Menurunnya presentase penduduk miskin	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kel. yang aktif	Pemberdaya-an Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persen	-	-	-	-	-	75	80	85
				Persentase tumbuhnya usaha ekonomi masyarakat desa/kelurahan	Pemberdaya-an Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persen	-	-	-	-	-	56,00	38,00	0,40
				Persentase transmigran yang berhasil meningkatkan	Ketrans-migrasian	Disnakertrans	Persen	-	-	-	-	-	82,50	82,75	83,00





Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan	OPD	Satuan	Target RPJMD Lama					Usulan Perubahan Target		
								2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019
				taraf ekonomi dan sosialnya (kepala keluarga)											
		Indeks Gini	11. Meningkatkan Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penurunan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Sosial	Dinas Sosial	Persen	-	-	-	-	-	1,45	1,47	1,47
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	12. Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan	Indeks	-	-	-	-	-	71,62	72,32	72,89
				Persentase penurunan kasus tindak kekerasan dan trafficking di Jawa Timur	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan	Persen	-	-	-	-	-	15,00	20,00	25,00
				Persentase laju pertumbuhan penduduk	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan	Persen	0,68	0,67	0,66	0,65	0,64	0,66	0,65	0,64
				Cakupan KB Aktif/CPR (%)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan	Persen	64	65	66	67	67	66,00	70,50	71,00
Misi 2 : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan	Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi dengan mengembangk	Pertumbuhan PDRB/LPE	1. Meningkatkan ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PPH	83,30	84,40	85,50	86,60	87,70	85,50	86,60	87,70
				Ketersediaan Pangan	Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Ton								







Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan	OPD	Satuan	Target RPJMD Lama					Usulan Perubahan Target		
								2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019
berdaya saing, berbasis agrobisnis/ agroindustri, dan industrialisasi	an sektor-sektor unggulan			- Beras	Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Ton	7.741.873	7.780.579	7.819.486	7.858.584	7.897.877	8.905.000	8.970.000	9.035.000
				- Jagung	Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Ton	6.378.543	6.474.225	6.571.336	6.669.907	6.769.955	6.300.000	6.500.000	6.500.000
				- Kedelai	Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Ton	480.800	490.417	500.225	510.229	520.434	340.000	340.000	360.000
			2.Meningkatnya kontribusi sektor-sektor unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi	Nilai Ijin Prinsip Investasi (PMA dan PMDN)	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Trilyun Rupiah	-	-	-	-	-	100	115	125
				Persentase Pertumbuhan Omzet Koperasi dan UKM	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Persen	-	-	-	-	-	8,20	8,90	9,70
				Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Trilyun Rupiah	-	-	-	-	-	80	90	100
				Persentase Pertumbuhan Sub Kategori Perikanan terhadap PDRB	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Persen	4,7	4,8	5,0	5,2	5,3	5,0	5,2	5,3
				Persentase Pertumbuhan sub kategori Tanaman Pangan terhadap PDRB	Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Persen						2,755	2,843	2,931
				Persentase Pertumbuhan sub kategori perkebunan terhadap PDRB	Pertanian	Dinas Perkebunan	Persen	1,60-2,00	2,1-2,3	2,4-2,5	2,6-3,0	3,1-3,5	2,17-3,01	2,20-3,04	2,25-3,08





Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan	OPD	Satuan	Target RPJMD Lama					Usulan Perubahan Target		
								2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019
				Persentase Pertumbuhan sub kategori peternakan terhadap PDRB	Pertanian	Dinas Peternakan	Persen	4,26 - 4,43	4,38 - 4,45	4,63 - 4,94	4,57 - 4,71	4,58 - 4,81	2,87	2,9	2,94
				Persentase Kontribusi Sub kategori Kehutanan dan Penebangan Kayu Terhadap PDRB	Kehutanan	Dinas Kehutanan	Persen	-	-	-	-	-	0,4	0,4	0,4
				Persentase Share net ekspor pada PDRB menurut penggunaan	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persen	-	-	-	-	-	1,70	1,80	1,90
				Persentase Pertumbuhan Industri pengolahan	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persen	-	-	-	-	-	5,50	5,80	5,85
				Persentase kontribusi pertumbuhan sektor pariwisata terhadap PDRB	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Persen	-	-	-	-	-	5,80	5,87	5,94
			3.Meningkatnya ketersediaan dan kualitas layanan infrastruktur strategis	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	Persen	-	-	-	-	-	90,70	93,73	97,54
				Rasio Elektrifikasi	Energi, dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM	Rasio	-	-	-	-	-	0,88	0,89	0,90
				Persentase Pelayanan Air untuk Irigrasi	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	Persen	-	-	-	-	-	82,75	83,20	83,80
				Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perhubungan	Perhubungan	Dinas Perhubungan	Indeks	-	-	-	-	-	80,00	80,00	80,00







Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan	OPD	Satuan	Target RPJMD Lama					Usulan Perubahan Target		
								2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019
				Persentase Sub Sektor Transportasi terhadap PDRB	Perhubungan	Dinas Perhubungan	Persen	-	-	-	-	-	2,00	2,00	2,00
Misi 3 : Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang	Meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup serta penataan ruang wilayah provinsi yang berkelanjutan	Indikator Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	1.Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, serta Melestarikan Ketersediaan Sumber Daya Alam dan Fungsi Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks	-	-	-	-	-	89,30	89,35	89,40
				Indeks Kualitas Air	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks	-	-	-	-	-	53,00	54,00	55,00
				Indeks Tutupan Lahan	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks	-	-	-	-	-	57,00	60,00	63,00
				Indeks Tutupan Hutan	Kehutanan	Dinas Kehutanan	Indeks	-	-	-	-	-	55,35 – 55,85	55,86 – 56,36	55,86 – 56,36
			2.Terwujudnya Kepastian Penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Luas Kawasan yang Peruntukannya Sesuai Dengan RTRW	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Persen						56,06	62,81	73,07
Misi 4 : Meningkatkan reformasi birokrasi, dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> ) dan bersih ( <i>clean government</i> ) serta menjunjung tinggi profesionalisme dalam pelaksanaan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	1.Meningkatnya pemanfaatan TIK dan Layanan Informasi Publik	Hasil evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai	-	-	-	-	-	94,50	95,20	96,00
			2. Meningkatkan ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas	Persentase release data statistik akurat yang tepat waktu	Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persen	-	-	-	-	-	40%	55%	60%
			3. Meningkatkan pemanfaatan TIK dalam pengamanan informasi	Persentase informasi persandian yang diamankan	Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persen	-	-	-	-	-	20%	20%	30%
			4.Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi, dan handal	Persentase organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tertib arsip	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Persen	-	-	-	-	-	42	70	100





Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan	OPD	Satuan	Target RPJMD Lama					Usulan Perubahan Target		
								2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019
		Indeks Reformasi Birokrasi	5.Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan	Persentase jumlah program di RKPD yang sesuai dengan RPJMD	Penunjang Urusan Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen						100	100	100
				Persentase usulan musrenbang yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan	Penunjang Urusan Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen						30	32	34
				Prosentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Hasil Penelitian yang dimanfaatkan	Penunjang Urusan Pemerintahan	Badan Penelitian dan Pengembangan	Persen	-	-	-	-	-	25	30	35
				Persentase OPD Provinsi dan Kab/kota yang memiliki Kegiatan Mendukung Sistem Inovasi Daerah Jawa Timur	Penunjang Urusan Pemerintahan	Badan Penelitian dan Pengembangan	Persen	-	-	-	-	-	7	10	13
			6.Meningkatnya transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Badan Pendapatan Daerah	Rp (dalam Juta)	-	-	-	-	-	13.217.393,37	13.460.593,41	13.709.614,39
				Nilai opini BPK	Penunjang Urusan Pemerintahan	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Persentase Ketaatan terhadap perundang-undangan daerah oleh OPD Pemerintah Provinsi Jawa	Penunjang Urusan Pemerintahan	Inspektorat	Persen					70	75	75	75
				Provinsi Jawa											







Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan	OPD	Satuan	Target RPJMD Lama					Usulan Perubahan Target		
								2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019
				Timur dan Kab/Kota di Jawa Timur											
				Nilai SAKIP	Penunjang Urusan Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Nilai	A	A	A	A	A	A	AA	AA
				Predikat Hasil Evaluasi LPPD	Penunjang Urusan Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Nilai	-	-	-	-	-	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
				Persentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang yang lebih tinggi, kesesuaian dan kepentingan umum	Penunjang Urusan Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Persen	-	-	-	-	-	85,00	85,00	85,00
				Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	Penunjang Urusan Pemerintahan	Badan Perwakilan Provinsi (Baperprov)	Persen	-	-	-	-	-	85	90	95
				Persentase Pelayanan Keprotokolan	Penunjang Urusan Pemerintahan	Badan Penghubung	Persen	-	-	-	-	-	100	100	100
				Persentase penduduk ber KTP	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan	Persen	-	-	-	-	-	93,50	94,25	95,00





Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan	OPD	Satuan	Target RPJMD Lama					Usulan Perubahan Target		
								2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019
			7.Meningkatnya kompetensi dan kualitas SDM Aparatur Pemerintah	Persentase penataan pegawai ASN sesuai formasi kebutuhan dan kompetensi	Penunjang Urusan Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Persen	-	-	-	-	-	97,00	98,00	99,00
				Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP)	Penunjang Urusan Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Indeks	-	-	-	-	-	80,00	85,00	90,00
				Persentase peserta diklat yang memperoleh sertifikat kompetensi (certificate of competence) dengan kualifikasi kelulusan minimal memuaskan (skor 80,1-90)	Penunjang Urusan Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Persen	-	-	-	-	-	93,00	94,00	95,00
			8.Mewujudkan sistem penanggulangan bencana untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	Persentase Korban Terdampak Bencana yang Ditangani	Penunjang Urusan Pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persen	-	-	-	-	-	100	100	100
				Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Penunjang Urusan Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Indeks	-	-	-	-	-	76,50	77,50	78,50
			9.Meningkatnya peran DPRD sesuai fungsinya												







Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan	OPD	Satuan	Target RPJMD Lama					Usulan Perubahan Target		
								2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Misi 5 : Meningkat-kan Kualitas Kesalehan Sosial dan Harmoni Sosial	Menjamin terciptanya iklim demokrasi yang kondusif	Indeks Kesalehan Sosial	1. Meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak politik dan penanganan konflik sosial.	Persentase kejadian terkait poleksosbud di Jawa Timur yang diselesaikan	Penunjang Urusan Pemerintahan	Bakesbangpol	Persen	-	-	-	-	-	90,00	90,00	90,00
				Indeks Demokrasi Indonesia	Penunjang Urusan Pemerintahan	Bakesbangpol	Indeks	-	-	-	-	-	79,50	81,50	82,50
			2. Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang taat hukum	Persentase penanganan kasus pelanggaran ketertiban umum & ketentraman yang diselesaikan	Ketentrama Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Satpol PP	Persen	-	-	-	-	-	5,00	5,00	5,00
				Persentase penegakan supremasi hukum dan HAM di Jawa Timur	Ketentrama Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Sekretariat Daerah	Persen	-	-	-	-	-	85,00	85,00	85,00
			3. Meningkatkan pelestarian seni budaya	Jumlah Karya Seni Budaya yang mendapat penghargaan nasional	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Buah	-	-	-	-	-	20	20	20
				Persentase Cagar Budaya (benda, Struktur, Situs, Kawasan) yang dipelihara/ dilestarikan	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Persen	-	-	-	-	-	96,30	98,20	100,00





Tabel 5.2 Keselarasan Pencapaian Sasaran Pembangunan Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019

SASARAN PEMBANGUNAN JAWA TIMUR	SASARAN TAHUN 2019	SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN TAHUN 2019
1. SASARAN MAKRO			
Pembangunan Manusia dan Masyarakat			
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,00-70,25	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,3
		Indeks Pembangunan Masyarakat*)	Meningkat
Indeks Gini	0,380-0,400	Indeks Gini	0,36
		Meningkatnya presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Min. 95%
		Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan	
		Pekerja formal	62,4 juta
		Pekerja informal	3,5 juta
Ekonomi Makro			
Pertumbuhan PDRB/LPE	5,66-6,06	Pertumbuhan ekonomi	8,00%
		PDB per Kapita (Rp ribu) Tahun Dasar 2010	72.217
		PDB per Kapita (Rp ribu) Tahun Dasar 2000	
		Inflasi	3,50%
		Rasio Pajak Tahun Dasar 2010 ***)	16,00%
Persentase Penduduk Miskin	11,20-10,90	Tingkat Kemiskinan	7,0-8,0%
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,99 - 3,90	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,0-5,0%
2. SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT			
Kependudukan dan Keluarga Berencana			







<b>SASARAN PEMBANGUNAN JAWA TIMUR</b>	<b>SASARAN TAHUN 2019</b>	<b>SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL</b>	<b>SASARAN TAHUN 2019</b>
Laju Pertumbuhan Penduduk	0,64	Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk	1,19%/tahun (2010-2020)
		Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR)	2,3
		Angka prevalensi Pemakaian kontrasepsi (CPR) suatu cara (all methods)	66%
<b>Pendidikan</b>			
Angka Rata-rata Lama Sekolah Usia 25 Tahun Ke Atas	7,58 (tahun)	Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	8,8 (tahun)
		Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	96,10%
		Prodi Perguruan Tinggi Minimal Terakreditasi B	68,40%
		Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	84,20%
		Persentase SMP/MT berakreditasi minimal B	81,00%
		Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	84,60%
		Persentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B	65,00%
		Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,9
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA	81,57	Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,6
<b>Kesehatan</b>			
		Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat	
Angka Kematian Ibu (AKI)	86,00	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	306
Angka Kematian Bayi (AKB)	22,00	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	24





SASARAN PEMBANGUNAN JAWA TIMUR	SASARAN TAHUN 2019	SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN TAHUN 2019
		Prevalensi kekurangan gizi ( <i>underweight</i> ) pada anak balita (persen)	17
Persentase stunting	23%	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (dibawah 2 tahun) (persen)	28
		Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	
Persentase keberhasilan pengobatan TB	93%	Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk (persen)	245
Persentase penderita HIV yang mendapatkan ARV	83%	Prevalensi HIV (persen)	<0,5
		Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)	23,4
		Prevalensi obesitas penduduk usia 18+ tahun (persen)	15,4
		Persentase merokok penduduk usia ≤18 tahun	5,4
		Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	
Persentase Rumah Sakit terakreditasi	80%	Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas terakreditasi	5.600
		Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi	95
		Jumlah puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan	5.600
Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan			
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,51-94,01	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Meningkat
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72,89	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Meningkat
Perlindungan Anak			







<b>SASARAN PEMBANGUNAN JAWA TIMUR</b>	<b>SASARAN TAHUN 2019</b>	<b>SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL</b>	<b>SASARAN TAHUN 2019</b>
Persentase penurunan kasus tindak kekerasan dan trafficking di Jawa Timur	25%	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak	Menurun
Pembangunan Masyarakat			
		Indeks gotong royong (mengukur kepercayaan kepada lingkungan tempat tinggal, kemudahan mendapatkan pertolongan, aksi kolektif masyarakat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dan kegiatan bakti sosial, serta jejaring sosial)	Meningkat
Indeks Kesalehan Sosial	> 60	Indeks toleransi (mengukur nilai toleransi masyarakat dalam menerima kegiatan agama dan suku lain di lingkungan tempat tinggal)	Meningkat
		Indeks rasa aman (mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal)	Meningkat
Persentase penanganan kasus pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman yang diselesaikan	1,0%	Jumlah konflik sosial (per tahun)	Meningkat
Persentase pertumbuhan anggota Satlinmas dan masyarakat yang bersertifikat dalam pelaksanaan tugas PAM Swakarsa, penanggulangan bencana, dan pemadam kebakaran	0,25%		
<b>3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN</b>			
Kedaulatan Pangan			
Ketersediaan pangan		Produksi Dalam Negeri	
Beras (Ton)	9.035.000	Padi (Juta Ton)	82
Jagung (Ton)	6.500.000	Jagung (Juta Ton)	24,1
Kedelai (Ton)	360.000	Kedelai (Juta Ton)	2,6





SASARAN PEMBANGUNAN JAWA TIMUR	SASARAN TAHUN 2019	SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN TAHUN 2019
Persentase Pertumbuhan sub kategori perkebunan terhadap PDRB	2,25-3,08	Gula (Juta Ton)	3,8
Persentase Pertumbuhan sub kategori peternakan terhadap PDRB	2,94%	Daging Sapi (Ribu Ton)	755,1
Persentase Pertumbuhan Sub kategori Perikanan terhadap PDRB	5,3%	Produksi Ikan (juta ton)	18,8
Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi			
Persentase Pelayanan Air Untuk Irigrasi	83,80%	Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi air permukaan , air tanah dan rawa (juta ha)	9,89
Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik	69,12%	Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (juta ha)	3,01
		Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak (ribu ha)	304,75
		Pembangunan waduk	49
Peningkatan Produksi Sumber Daya Energi			
Rasio Elektrifikasi	0,90	Minyak Bumi (ribu SBM/hari)	
		Gas Bumi (ribu SBM/hari)	
		Batubara (juta ton)	
Penggunaan Dalam Negeri (DMO)			
		Gas Bumi DN	
		Batubara	
		Pembangunan FSRU (unit)	
		Jaringan pipa gas (km)	
		Pembangunan SPBG (unit)	
		Jaringan gas kota (sambungan rumah)	
		Pembangunan kilang bumi (unit)	







SASARAN PEMBANGUNAN JAWA TIMUR	SASARAN TAHUN 2019	SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN TAHUN 2019
Maritim dan Kelautan			
		Memperkuat Jatidiri sebagai Negara Maritim	
		Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB	17466 (2017)
		Penyelesaian batas maritim antar negara	9
		Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar	
		meningkatkan ketaatan pelaku perikanan	87
		Memabngun Konektivitas Nasional	
		Pembangunan Pelabuhan untuk menunjang tol Laut	24
		Pengembangan pelabuhan penyeberangan	270
		pembangunan kapal perintis	104
		Pengembangan ekonomi Maritim dan Kelautan	
Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	5,3%	Produksi hasil perikanan (juta ton)	40-50
		Pengembangan pelabuhan perikanan	24
		Peningkatan luas kawasan konservasi laut	20 juta ha
Pariwisata dan Industri Manufaktur			
		Pariwisata	
Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	6,28%	kontribusi terhadap PDB Nasional	8%
		Wisatawan Manca Negara (orang)	20 juta
		Wisatawan Nusantara (kunjungan)	275 juta
		Devisa (triliun rupiah)	260
		Industri Manufaktur	
Persentase Pertumbuhan IndustriPengolahan	5,85%	Pertumbuhan sektor industri	8,60%





SASARAN PEMBANGUNAN JAWA TIMUR	SASARAN TAHUN 2019	SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN TAHUN 2019
		kontribusi terhadap PDB	21,60%
		Penambahan jumlah industri berskala menengah dan besar	59000 unit (2015-2019)
Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar dan Konektivitas			
		Ketahanan Air	
		Kapasitas air baku nasional	118,6
		Pembangunan waduk	49
Persentase Ketersediaan dan Kebutuhan air baku	88,10%	Ketersediaan air irigasi yang bersumber dari waduk	20
		terselesaikan status DAS lintas negara	19 DAS
		berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi dalam KPH	5,5 juta ha
		Pulihnya kesehatan 5 DAS Prioritas (DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Serayu, DAS Bengawan Solo, dan DAS Brantas) dan 10 DAS prioritas lainnya sampai dengan tahun 2019	15 DAS
		Terjaganya / meningkatnya jumlah mata air di 5 DAS prioritas dan 10 DAS prioritas lainnya sampai dengan 2019 melalui konservasi sumber daya air	15 DAS
		Kapasitas/Daya tampung	19 miliar m3
Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik	69,12%	Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi (permukaan, air tanah, pompa, rawa, dan tambak)	10 Juta Ha
		Rata-rata kapasitas Desain Pengendalian Struktural dan Non Struktural Banjir	10-100 tahun
		Infrastruktur Dasar dan Konektivitas	
		Kapasitas pembangkit (GW)	86,6







SASARAN PEMBANGUNAN JAWA TIMUR	SASARAN TAHUN 2019	SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN TAHUN 2019
Rasio Elektrifikasi	0,90	Rasio elektrifikasi (%)	96,6
		Konsumsi Listrik Perkapita	1.200KWh
Persentase Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	78,14	Kawasan permukiman kumuh perkotaan	0 ha
Persentase Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	78,14	Kekurangan tempat tinggal (backlog) berdasarkan perspektif menghuni	5 juta
Persentase Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	78,14	Akses Air Minum Layak	100%
Persentase Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	78,14	Akses Sanitasi Layak	100%
Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	97,54	Kondisi mantap jalan nasional	98%
Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer	66,07	Pengembangan jalan nasional	45.592 km
Persentase pembangunan jalan menuju kawasan potensial	62,17	Pembangunan jalan baru (kumulatif 5 tahun)	2.650 km
		Pengembangan jalan tol (kumulatif 5 tahun)	1.000 km
		panjang jalur kereta api	8.692 km
		Pengembangan pelabuhan	450
		Dwelling Time Pelabuhan	3-4 hari
		Jumlah bandara	252
		On-time Performance penerbangan	95%
		Kab/Kota yang dijangkau Broadband	100%
		Jumlah Dermaga Penyeberangan	275





SASARAN PEMBANGUNAN JAWA TIMUR	SASARAN TAHUN 2019	SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN TAHUN 2019
		Pangsa Pasar Angkutan Umum Perkotaan	32%
		Lingkungan	
		Emisi Gas Rumah Kaca	~ 26%
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	67,00-68,52	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,5-68,5
Indeks Tutupan Hutan	55,86 – 56,36	Tambahan Rehabilitasi Hutan	750 ribu ha (dalam kawasan)
4. SASARAN PEMBANGUNAN DIMENSI PEMERATAAN			
Menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi			
Presentase penduduk miskin	11,20 - 10,90	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0% - 8,0%
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,99 - 3,90	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,0 % - 5,0 %
Meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu			
		Perlindungan Sosial bagi Penduduk Rentan dan Kurang Mampu (40% penduduk berpendapatan terendah)	
		Kepesertaan Jaminan Kesehatan	100%
		Akses Pangan Bernutrisi	100%
		Akses Terhadap Layanan Keuangan	25%
		Pelayanan Dasar Bagi Penduduk Rentan dan Kurang Mampu (40% penduduk berpendapatan terendah)	
Persentase penduduk ber KTP	95,00	Kepemilikan akte lahir (2013)	77,4%
Persentase Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	78,14	Akses air minum	100%
		Akses sanitasi layak	100%
		Akses penerangan	100%
		Peningkatan daya saing tenaga kerja	







SASARAN PEMBANGUNAN JAWA TIMUR	SASARAN TAHUN 2019	SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN TAHUN 2019
Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	67,00	Penyediaan lapangan kerja (2015-2019)	10 juta (rata-rata 2 juta per tahun)
TPAK	66,68	Persentase tenaga kerja formal	51,0%
		Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan	
		Pekerja formal	62,4 juta
		Pekerja Informal	3,5 juta
		Meningkatkan kualitas dan keterampilan pekerja	
		Jumlah pelatihan	2.170.377**)
		Jumlah sertifikasi	863.819**)
		Jumlah tenaga kerja keahlian menengah yang kompeten	42,0%
		Kinerja lembaga pelatihan milik negara menjadi berbasis kompetensi	25,0%
5. SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH			
Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah			
		Peran Wilayah dalam Pembentukan PDB Nasional	
		Sumatera	24,6
		Jawa	55,1
		Bali – Nusa Tenggara	2,6
		Kalimantan	9,6
		Sulawesi	5,2
		Maluku – Papua	2,9
		Pembangunan Perdesaan	





<b>SASARAN PEMBANGUNAN JAWA TIMUR</b>	<b>SASARAN TAHUN 2019</b>	<b>SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL</b>	<b>SASARAN TAHUN 2019</b>
Persentase tumbuhnya usaha ekonomi masyarakat desa/kelurahan	94,40	Penurunan desa tertinggal	s.d. 5.000 desa tertinggal
Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	85	Peningkatan desa	Paling sedikit 2.000 desa mandiri
		Pengembangan Kawasan Perbatasan	
		Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN)	10 (187 lokasi prioritas)
		Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan	92 pulau kecil terluar/terdepan
		Pembangunan Daerah Tertinggal	
		Jumlah Daerah Tertinggal	42
		Kabupaten terentaskan	80
		Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	7,24%
		Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	14,0%
		Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal	69,59
		Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa	
		Kawasan Ekonomi Khusus di Luar Jawa	14
		Kawasan Industri	14
		Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)	4
		Pembangunan Kawasan Perkotaan	







SASARAN PEMBANGUNAN JAWA TIMUR	SASARAN TAHUN 2019	SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN TAHUN 2019
		Pembangunan Metropolitan di Luar Jawa sebagai PKN dan Pusat Investasi	2+ 5(usulan baru)
		Optimalisasi 20 kota otonomi berukuran sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi di Luar Jawa	20 dioptimalkan perannya
		Penguatan 39 pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	39 pusat pertumbuhan yang diperkuat
		Pembangunan 10 Kota Baru Publik	10 Kota Baru
6. SASARAN PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN			
Politik dan Demokrasi			
		Tingkat Partisipasi Politik Pemilu	77,5 %
Indeks Demokrasi Indonesia	82,50	Indeks Demokrasi Indonesia	75,0
Penegakan Hukum			
Persentase penegakan supremasi hukum dan HAM di Jawa Timur	85	Indeks Pembangunan Hukum	75%
Persentase Ketaatan terhadap perundang-undangan daerah oleh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kab/Kota di Jawa Timur	75%	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	4,0
		Indeks Penegakan Hukum Tipikor	Naik 20% (skala 5)
Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi			
Indeks Kepuasan Masyarakat	84	Kualitas Pelayanan Publik	
		Integritas Pelayanan Publik (Pusat)	9,0
		Integritas Pelayanan Publik (Daerah)	8,5





SASARAN PEMBANGUNAN JAWA TIMUR	SASARAN TAHUN 2019	SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN TAHUN 2019
Indeks Reformasi Birokrasi	71	Persentase Instansi Pemerintah dengan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik (Kategori B)	
		Kementerian/Lembaga	75%
		Provinsi	60%
		Kabupaten/Kota	45%
Nilai opini BPK	WTP	Opini WTP atas Laporan Keuangan K/L	95%
		Persentase Instansi Pemerintah yang Akuntabilitas Kinerja Baik (Skor B)	
		Kementerian/Lembaga	85,0%
		Provinsi	75,0%
		Kabupaten/Kota	50%
Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah			
		Kinerja Keuangan Daerah	
		Rata-rata presentase belanja pegawai Kab/Kota	35%
		Rata-rata pajak retribusi Kab/Kota terhadap total pendapatan	11,0 %
		Rata-rata pajak retribusi Provinsi terhadap total pendapatan	40,0 %
		Rata-rata belanja modal Kab/Kota	30,0 %
		Rata-rata belanja modal Provinsi	30,0 %
		Rata-rata presentase belanja pegawai Kab/Kota	35%
		Rata-rata presentase belanja pegawai Provinsi	13%
		Rata-rata ketergantungan dana transfer Kab/Kota	70,0 %
		Rata-rata ketergantungan dana transfer Provinsi	50,0 %
Nilai opini BPK	WTP	Rata-rata nasional WTP Pemda Provinsi	85%







SASARAN PEMBANGUNAN JAWA TIMUR	SASARAN TAHUN 2019	SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN TAHUN 2019
		Rata-rata nasional WTP Pemda Kabupaten	60%
		Rata-rata nasional WTP Pemda Kota	65%
		Kinerja Kelembagaan	
		PTSP Kondisi Mantap	55,0 %
		Perda bermasalah	50 perda
		Rata-rata kinerja Daerah Otonomi Baru	
		· Rata-rata kinerja maksimal	70,0 %
		· Rata-rata kinerja minimal	48,0 %
		Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yg ideal (sesuai PP 41) sampel 299 daerah	70%
		Penerapan SPM di daerah (Prov/Kab/Kota)	90%
		Kinerja Aparatur	
Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP)	90	Tingkat pendidikan aparatur Pemda S1, S2 dan S3	50,0 %
Pertahanan dan Keamanan			
		Tingkat Pemenuhan MEF (Tiga Tahap)	Tahap II
		Kontribusi industri pertahanan DN terhadap MEF	20%
		Laju Peningkatan Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba	0,05%











## DAFTAR ISI

<b>BAB 5 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN.....</b>	<b>286</b>
5.1 Visi .....	286
5.2 Misi.....	290
5.3 Tujuan dan Sasaran .....	292
5.4 Penyelarasan Pencapaian Sasaran RPJMN .....	293
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ii</b>







## DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Visi, Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 .....	294
Tabel 5.2 Keselarasan Pencapaian Sasaran Pembangunan Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019 .....	304

